

Project Base Report Pertemuan 6

Nama : Reyon Febrio
Npm : 2316041093
Kelas : Organisasi Internasional & Globalisasi MBKM 2026
Tema : “Bagaimana posisi Indonesia di UN saat ini menurut anda?”

Peran Indonesia di PBB dalam Dinamika Politik Global Kontemporer: Efektif atau Simbolis?

I. Pendahuluan

Perkembangan politik global kontemporer menunjukkan transformasi menuju tatanan internasional yang semakin kompleks, dinamis, dan cenderung multipolar. Rivalitas antar kekuatan besar, meningkatnya konflik bersenjata di berbagai kawasan, serta melemahnya efektivitas institusi multilateral menandai kondisi yang penuh ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, negara berkembang dengan kapasitas menengah mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas global, terutama melalui forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya memanfaatkan ruang tersebut. Dengan posisi sebagai negara demokrasi besar dan bagian dari Global South, Indonesia secara konsisten terlibat dalam berbagai mekanisme PBB. Keterlibatan ini terlihat dalam keanggotaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 sampai 2020, serta kontribusi berkelanjutan dalam misi penjaga perdamaian. Dalam periode tersebut, Indonesia mendorong pendekatan penanggulangan terorisme yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada dimensi pencegahan dan deradikalisasi (Rimapradesi et al., 2024). Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi kebijakan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar respons militer.

Di sisi lain, Indonesia juga mengembangkan diplomasi normatif dalam forum global. Salah satu contohnya adalah promosi *religious moderation* sebagai instrumen diplomasi perdamaian dalam Sidang Umum PBB. Narasi ini digunakan untuk merespons konflik global yang semakin kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh faktor identitas (Bianda et al., 2025). Selain itu, kontribusi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian tidak hanya

bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola dalam operasi internasional (Syaharani, 2026).

Meskipun demikian, terdapat perdebatan mengenai efektivitas peran Indonesia di PBB. Dalam literatur hubungan internasional, Indonesia sering dikategorikan sebagai *middle power* yang aktif dalam diplomasi multilateral (Alvian et al., 2018; Rosyidin & Kusumawardhana, 2024). Namun, posisi tersebut tidak secara otomatis menjamin kemampuan untuk memengaruhi keputusan strategis global. Struktur kekuasaan dalam PBB yang masih didominasi oleh negara besar menjadi kendala utama bagi negara seperti Indonesia.

Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini mengajukan argumen bahwa **peran Indonesia di PBB bersifat ambivalen**. Indonesia efektif dalam membangun legitimasi normatif dan memainkan peran diplomatik sebagai *middle power*, tetapi pengaruhnya terhadap keputusan strategis global masih terbatas sehingga dalam banyak kasus tampak simbolik. Benang merah tulisan ini terletak pada ketegangan antara **aspirasi normatif Indonesia dan keterbatasan struktural sistem internasional**.

II. Landasan Teori

Untuk memahami ambivalensi tersebut, tulisan ini menggunakan tiga kerangka utama, yaitu *middle power diplomacy*, politik luar negeri bebas aktif, dan multilateralisme.

Konsep *middle power diplomacy* merujuk pada strategi negara dengan kapasitas menengah yang mengandalkan kerja sama multilateral, pembangunan norma, dan diplomasi koalisi. Indonesia mencerminkan karakter ini melalui kecenderungannya untuk bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam berbagai forum internasional (Alvian et al., 2018). Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memperoleh legitimasi internasional tanpa harus mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi yang dominan.

Namun, pendekatan *middle power* juga memiliki keterbatasan inheren. Negara dalam kategori ini sering kali lebih efektif dalam membangun narasi dan norma dibandingkan dalam memengaruhi hasil kebijakan konkret. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari kecenderungan untuk mengedepankan pendekatan inklusif dan non-konfrontatif, yang meskipun meningkatkan kredibilitas, tidak selalu menghasilkan dampak strategis yang signifikan (Rosyidin & Kusumawardhana, 2024).

Kerangka kedua adalah politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini menekankan kebebasan dalam menentukan sikap serta keaktifan dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam praktiknya, prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk berinteraksi dengan berbagai aktor global tanpa terikat pada aliansi tertentu. Namun, fleksibilitas ini juga dapat menjadi dilema. Dalam situasi yang membutuhkan posisi tegas, pendekatan bebas aktif dapat menghasilkan sikap yang terlalu berhati-hati sehingga mengurangi daya tawar diplomatik.

Kerangka ketiga adalah multilateralisme. Indonesia secara konsisten mendukung peran PBB sebagai forum utama dalam menyelesaikan masalah global. Dalam perspektif konstruktivis, keterlibatan ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun identitas sebagai pemimpin Global South yang memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil (Heriamsal, 2025). Namun, realitas multilateralisme menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan, terutama dalam Dewan Keamanan PBB, yang membatasi efektivitas negara berkembang.

Dengan demikian, ketiga kerangka ini menunjukkan bahwa peran Indonesia di PBB berada dalam tarik-menarik antara **kapasitas normatif dan keterbatasan struktural**, yang menjadi inti dari argumen tulisan ini.

III. Metodologi

Kajian ini ditulis dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang tersedia.

Sumber data berasal dari enam artikel jurnal ilmiah yang telah terverifikasi. Sumber-sumber tersebut mencakup kajian mengenai diplomasi *middle power*, peran Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB, diplomasi normatif dalam forum global, serta kontribusi dalam operasi penjaga perdamaian. Seluruh sumber dipilih karena relevan dengan fokus penelitian dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang dibahas.

Teknik analisis dilakukan melalui pengelompokan tematik yang mencakup tiga aspek utama, yaitu rekam jejak historis, posisi dalam isu global kontemporer, dan evaluasi kritis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif.

IV. Pembahasan

A. Rekam Jejak Historis Indonesia di PBB

Secara historis, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap prinsip-prinsip PBB, khususnya dalam menjaga perdamaian dunia. Salah satu bentuk kontribusi paling nyata adalah partisipasi dalam misi penjaga perdamaian. Melalui Kontingen Garuda, Indonesia terlibat dalam berbagai operasi di kawasan konflik, termasuk di Afrika dan Timur Tengah.

Dalam periode 2020 sampai 2025, kontribusi tersebut mengalami perkembangan tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Indonesia mulai menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan misi, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme (Syaharani, 2026). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya meningkatkan standar kontribusinya dalam sistem internasional.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global. Dalam periode 2019 sampai 2020, Indonesia aktif mendorong agenda kontra-terorisme dengan pendekatan yang menekankan aspek pencegahan dan rehabilitasi (Rimapradesi et al., 2024). Pendekatan ini mencerminkan perspektif yang lebih holistik dalam menangani ancaman keamanan.

Namun demikian, jika ditarik benang merahnya, kontribusi historis Indonesia cenderung lebih kuat dalam isu-isu normatif dan non-tradisional. Dalam isu geopolitik yang melibatkan kepentingan kekuatan besar, peran Indonesia relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara **partisipasi aktif dan pengaruh strategis**.

B. Posisi Indonesia dalam Isu Global Kontemporer

Dalam dinamika global saat ini, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai aktor yang mendorong perdamaian dan stabilitas melalui pendekatan normatif. Salah satu strategi utama adalah promosi *religious moderation* sebagai instrumen diplomasi. Dalam konteks konflik global yang sering kali dipicu oleh faktor identitas, pendekatan ini menjadi relevan sebagai upaya membangun dialog dan mengurangi ketegangan (Bianda et al., 2025).

Selain itu, Indonesia juga berupaya memperkuat peran sebagai bagian dari Global South. Dalam perspektif konstruktivis, langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperjuangkan

kepentingan material, tetapi juga membentuk identitas kolektif yang lebih inklusif dalam sistem internasional (Heriamsal, 2025). Indonesia berusaha tampil sebagai jembatan antara negara berkembang dan negara maju.

Namun, pendekatan yang cenderung inklusif dan non-konfrontatif juga memiliki konsekuensi. Dalam konteks promosi demokrasi, misalnya, Indonesia memilih pendekatan yang tidak memaksakan nilai tertentu, tetapi lebih menekankan dialog dan pertukaran pengalaman (Rosyidin & Kusumawardhana, 2024). Pendekatan ini memperkuat citra sebagai mediator, tetapi dapat mengurangi efektivitas dalam mendorong perubahan konkret.

Dengan demikian, posisi Indonesia dalam isu global kontemporer menunjukkan konsistensi dalam pendekatan normatif, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan dalam menghasilkan pengaruh yang lebih tegas dan strategis.

C. Evaluasi Kritis

Evaluasi terhadap peran Indonesia di PBB menunjukkan adanya kombinasi antara kekuatan dan kelemahan yang saling berkaitan. Dari sisi kekuatan, Indonesia memiliki **modal legitimasi normatif** yang kuat. Status sebagai negara demokrasi besar dengan populasi Muslim terbesar memberikan kredibilitas dalam isu-isu perdamaian dan toleransi. Selain itu, pengalaman dalam misi penjaga perdamaian memperkuat posisi sebagai aktor yang memiliki kontribusi nyata.

Namun, dari sisi kelemahan, Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas material. Kekuatan ekonomi dan militer yang belum sebanding dengan negara besar membatasi daya tawar dalam sistem internasional. Selain itu, pendekatan diplomasi yang terlalu berfokus pada norma sering kali tidak diimbangi dengan strategi yang mampu menghasilkan dampak konkret.

Keterbatasan struktural juga menjadi faktor penting. Sistem pengambilan keputusan di PBB, khususnya di Dewan Keamanan, masih didominasi oleh negara permanen dengan hak veto. Kondisi ini menciptakan hambatan bagi negara seperti Indonesia untuk memengaruhi keputusan strategis secara signifikan.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa peran Indonesia di PBB berada dalam kondisi yang **tidak sepenuhnya lemah, tetapi juga belum optimal**.

V. Argumen Penulis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa peran Indonesia di PBB tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai efektif atau simbolik. Indonesia menunjukkan efektivitas dalam membangun norma, memperkuat legitimasi internasional, serta berkontribusi dalam isu-isu tertentu seperti perdamaian dan kontra-terorisme.

Namun, dalam dimensi strategis, peran tersebut masih terbatas. Indonesia belum mampu menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan global, terutama dalam isu yang melibatkan kepentingan kekuatan besar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Indonesia lebih bersifat normatif daripada struktural.

Oleh karena itu, posisi Indonesia lebih tepat dipahami sebagai **middle power yang efektif secara normatif, tetapi terbatas secara struktural**. Untuk meningkatkan peran tersebut, diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Indonesia perlu memperkuat kapasitas diplomasi, membangun aliansi dengan negara middle power lainnya, serta mengintegrasikan kekuatan ekonomi dengan kebijakan luar negeri.

VI. Kesimpulan

Peran Indonesia di PBB mencerminkan dinamika yang kompleks antara aspirasi dan realitas. Indonesia berhasil membangun citra sebagai aktor yang mendukung perdamaian dan kerja sama global, serta memberikan kontribusi nyata dalam berbagai inisiatif internasional. Namun, efektivitas peran tersebut masih dibatasi oleh struktur kekuasaan dalam sistem internasional yang tidak seimbang. Akibatnya, pengaruh Indonesia terhadap keputusan strategis global masih relatif terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **peran Indonesia di PBB bersifat ambivalen**, yaitu efektif dalam dimensi normatif tetapi terbatas dalam dimensi struktural. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan peran Indonesia memerlukan kombinasi antara pendekatan normatif dan penguatan kapasitas material agar mampu berkontribusi secara lebih signifikan dalam dinamika politik global.



Visual Alur Analitis Peran Indonesia Di PBB Dalam Dinamika Politik Global Kontemporer

Daftar Pustaka

- Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2018). Haluan baru politik luar negeri Indonesia: Perbandingan diplomasi middle power.
- Bianda, R., Niteh, M. Y., Ahmad, M., & Majid, M. A. (2025). Religious moderation in Prabowo Subianto's speech at the 2025 UN General Assembly: Indonesia's peace diplomacy in global conflicts. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 4(2), 323–356.
- Heriamsal, K. (2025). Indonesia and the Global South: A constructivist approach to diplomatic leadership in a multipolar world order. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 10(1).
- Rimapradesi, Y., Aisyi, T. R., & Khaerunnisa, A. (2024). Indonesia's diplomacy as a non-permanent member of the UN Security Council in combating terrorism crime 2019–2020. *Journal of Islamic World and Politics*, 8(1), 94–103.
- Rosyidin, M., & Kusumawardhana, I. (2024). Neither promoting nor projecting democracy: Indonesia's middlepowermanship in the Bali Democracy Forum under Joko Widodo. *International Relations of the Asia-Pacific*, 24(1), 65–100.
- Syahrani, S. D. (2026). Indonesia's role in strengthening the principles of good governance in UN peacekeeping operations: A case study of the Garuda Peacekeeping Force in Central Africa and Lebanon (2020–2025). *PROIROFONIC*, 1(1), 223–234.